

# MEGAPOLITAN

Adalah Sutiyoso, Gubernur DKI Jakarta, yang mencuatkan gagasan Megapolitan yang akan mempersatukan DKI dengan beberapa daerah milik Propinsi Jawa Barat dan Banten (Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang dan Cianjur) dan menimbulkan pro& kontra terutama dengan Gubernur Jawa Barat dan Banten. Berbagai reaksi muncul atas gagasan tersebut. Masyarakat Jawa Barat merasa keberatan dengan hal tersebut, karena konsep megapolitan dimaksud dikhawatirkan akan mencakup sebagian daerah Jawa Barat. Walaupun menurut Sutiyoso tidaklah demikian, yang ada justru sebaliknya daerah yang akan dijadikan megapolitan akan menjadi lebih makmur dan lebih tertata.

Gagasan yang tertuang dalam RUU tersebut adalah tentang pemerintahan DKI Jakarta yang membuat gerah para petinggi dan masyarakat Jawa Barat dan Banten. Di dalam ketentuan umum RUU dimaksud disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Megapolitan adalah suatu kawasan yang terdiri atas beberapa kota inti dan beberapa kawasan perkotaan lainnya yang satu sama lain memiliki ketergantungan baik masyarakatnya, penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan perkotaan. Pasal 13 ayat (2) RUU Pemerintahan DKI Jakarta dikemukakan bahwa: Rencana umum tata ruang kawasan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Cianjur merupakan Kawasan Megapolitan, dan rencana tata ruang tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah seperti tercantum dalam ayat (3) pada pasal yang sama. Pada pasal 15 ayat (1) dalam RUU tersebut disebutkan bahwa, Koordinasi pelaksanaan pembangunan berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang kawasan Ibukota Negara RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dilakukan oleh forum yang diketuai oleh Koordinator Kawasan Megapolitan dan berkedudukan selingkat Menteri, dan dibentuk dengan Peraturan Presiden (ayat 2). Sementara itu untuk pembiayaan seperti tertuang dalam pasal 21 ayat (5) dinyatakan bahwa, Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) disuliskan oleh Koordinator Kawasan Megapolitan/ Gubernur Propinsi DKI Jakarta pada setiap tahun anggaran kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan Kawasan Ibukota Negara di Propinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kabupaten Cianjur, pembiayaannya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Sebagai reaksi muncul, terutama dari Propinsi Jawa Barat dan Banten yang sebagian wilayahnya akan menjadi daerah Megapolitan. Kekhawatiran berpindahnya wilayah administrasi ke DKI Jakarta begitu kuat, sehingga penolakan tidak hanya datang dari pihak eksekutif tetapi dari DPRD dan masyarakat di kedua Propinsi tersebut. Gubernur Jawa Barat, Danny Setiawan, menyatakan, "Kemitraan dengan DKI Jakarta dengan wilayah sekitarnya selama ini tidak terjalin dalam bentuk hubungan kesetaraan yang bersifat take and give. Bahkan tidak saling menguntungkan dan terkesan yang kuat mengeksploitasi yang lemah". Hal ini terlihat seperti yang disampaikan PIT Gubernur Banten, Atut Chosiyah, bahwa "jalan yang masuk wilayah DKI Jakarta kondisinya bagus, tetapi jalan yang masuk wilayah Banten dan Tangerang itu jelek". (PR, 16/2/2006). Selanjutnya, Propinsi Jawa Barat sebagai hinterland-nya Ibu Kota Negara juga menanggung limpahan akibat perkembangan ekonomi DKI, seperti dampak lingkungan yang berat, sosial dan beban pelayanan sosial lainnya. Di samping itu sharing pendapatan juga tidak secara penuh dapat diterima oleh Jawa Barat. Belum lagi ekonomi biaya tinggi akan terjadi karena terjadinya pemusatan investasi di wilayah yang akan dijadikan megapolitan (Jabodetabekjur) seperti juga yang terjadi sekarang ini (Jabotabek), sehingga daerah-daerah sekitarnya sulit untuk memerankan fungsinya. Dominasi yang lemah terhadap yang kuat (DKI Jakarta sebagai yang kuat) juga telah menyebabkan keberadaan infrastruktur yang ada dikuasai oleh DKI, sementara daerah penyenggangnya sulit untuk mengembangkan dirinya. Namun demikian Sutiyoso sebagai pencetus ide ini, mengatakan bahwa akan banyak keuntungan yang didapatkan oleh daerah yang menjadi wilayah megapolitan, seperti jalur transportasi transjakarta (busway) akan sampai ke Tangerang, monorel hingga Bekasi dan Kereta Api bawah tanah (subway) hingga Depok. Selain itu peluang kerja akan semakin terbuka lebar ke daerah-daerah penyangga (Kompas, 10/2/2006).

Adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang juga turut menjadikan perdebatan megapolitan semakin seru, misalnya karena Banten akan kehilangan sebesar 90% PAD-nya apabila megapolitan ditujukan untuk mengubah status administratif Kabupaten dan Kota Tangerang, demikian menurut Ketua Komisi C (Keuangan) DPRD Propinsi Banten Media Warman (Kompas, 8/2/2006), dan tentu saja Jawa Barat juga akan kehilangan beberapa sumber PAD-nya juga. Ada catatan yang dikemukakan oleh ilmuwan di Jawa Barat yang ditulis di media PR, seperti Siti Sutriah Nurzaman seorang staf pengajar ITB yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek secara nasional konsep megapolitan akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap ekonomi nasional. Dimana megapolitan akan menampak investasi asing yang sangat dibutuhkan negara berkembang untuk memberikan lapangan kerja dan mendorong perekonomian nasional. Namun secara jangka panjang akan memperbesar kesenjangan antara wilayah megapolitan dengan wilayah lainnya, karena potensi perkembangan wilayah lain akan mengalir ke megapolitan. Sementara itu Her Suganda seorang anggota forum wartawan dan penulis Jabar menyatakan bahwa munculnya gagasan penggabungan wilayah Jabodetabekjur ke dalam wilayah DKI Jakarta seharusnya melalui kajian yang mendalam dengan melibatkan berbagai disiplin. Penggabungan wilayah tersebut sama artinya dengan perluasan wilayah. Selama ini, kajian kebijaksanaan tersebut belum teruji mampu mengatasi masalah yang dihadapi wilayah tersebut. Bahkan sebaliknya menimbulkan masalah baru bagi tetangganya yang wilayahnya berkurang. Karena hal demikian Prof.Kusnaka, dosen senior UNPAD, menyatakan perlunya kerjasama pemerintah daerah Propinsi Jabar dan DKI untuk duduk bersama menyusun program dan anggaran bersama serta melaksanakan bersama-sama dengan melibatkan seluruh stakeholders agar kedua daerah itu tetap eksis menyangga kelangsungan hidup umat manusia. Hal ini dikarenakan selama ini BKSP (Badan Kerja Sama Pembangunan) ternyata tidak berjalan dengan semestinya.

Pencaplokan wilayah administratif oleh DKI memang sebaiknya tidak dilakukan, karena akan sangat mengganggu keberlangsungan daerah lain. Disamping itu keinginan Sutiyoso untuk merealisasikan megapolitan juga tidak hanya sekedar keinginnya menjadi koordinator selingkat menteri karena akan selesai masa jabatan gubernurnya, seperti yang disampaikan oleh Irsyad Noorsy, Otonomi Daerah memerlukan kerjasama pembangunan antar daerah, dan jangan biarkan tetangga daerah kita merana dan tidak dibantu.